

BAB IV PENUTUP

Populasi pengungsi Bhutan yang berlokasi di Nepal, Asia Selatan (kaum *Lhotshampa*) adalah populasi pengungsi yang diteliti dalam penulisan ini. Lahirnya kaum *Lhotshampa* sebagai pengungsi akibat kebijakan demografi nasional RGOB yang diskriminatif telah menempatkan mereka di sebagian kecil kawasan Nepal dalam kamp-kamp penampungan selama lebih dari satu dekade sejak kepergian mereka akibat tekanan-tekanan dari RGOB pada akhir tahun 1990. Ketidaksanggupan Nepal untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup para pengungsi, dan keputusannya untuk memanggil UNHCR menyalurkan bantuan adalah keputusan yang diambil demi melindungi para pengungsi dan untuk melepaskan pemerintah Nepal dari beban yang harus ditanggung dalam menampung kaum *Lhotshampa* tersebut. Selain itu, Nepal sebelumnya tidak memiliki mekanisme maupun perangkat kebijakan yang mengatur urusan pengungsi di negaranya, oleh karena itu permohonan bantuan terhadap UNHCR pun segera dilayangkan.

Kehadiran para pengungsi menimbulkan suatu kompleksitas dimana berbagai aktor baik negara maupun non-negara dilibatkan, *decision-making process* menjadi berperan penting pada tiap level analisa, serta tentunya menuntut pertimbangan mendalam terhadap kondisi kehidupan para pengungsi, baik sebagai individu maupun sebagai suatu komunitas pengungsi. Tiap aktor memainkan peranan penting yang saling berkorelasi untuk menjamin terselenggaranya upaya

pengembalian hak-hak dasar pengungsi secara maksimal. Dengan demikian harus terjalin kerjasama yang baik dan terbina keterbukaan pada tiap-tiap tahap yang dilalui untuk melindungi pengungsi di *host country* dan juga untuk mencari solusi terbaik bagi kelanjutan nasib mereka, baik itu berupa repatriasi ke negara asal (Bhutan), relokasi di sebuah negara ketiga, maupun untuk berintegrasi di *host country*.

Kehadiran UNHCR untuk membantu memenuhi kebutuhan darurat para pengungsi di Nepal telah ditunjukkan dengan perencanaan dan pendirian tujuh kamp pengungsi di kawasan pedalaman Nepal demi menyediakan perlindungan (*shelter*) bagi para pengungsi. Selain *shelter* yang diperoleh dari kamp-kamp pengungsi UNHCR, para pengungsi tentu membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk bertahan hidup. Para pengungsi telah secara liar menebang hutan di wilayah Nepal demi memperoleh sumber-sumber makanan. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang disediakan bagi para pengungsi oleh UNHCR, didukung pula oleh penyelenggaraan kerjasama-kerjasama UNHCR dengan NGO Internasional, NGO Lokal, dan juga beberapa aparat pemerintah *host country* yang menangani hal-hal khusus berkenaan dengan keberadaan pengungsi. Selama periode waktu yang diteliti, UNHCR memperlihatkan peningkatan jumlah kerjasama dengan *sister organization* nya di PBB, seperti WHO, WFP, ILO, UNFPA, UNICEF, ILO, dan lainnya. Peningkatan kerjasama tersebut merupakan hasil pertimbangan terhadap penyesuaian pemenuhan kebutuhan para pengungsi kala itu. Peran kerjasama UNHCR dengan rekan-rekan operasional, sebagaimana telah dielaborasi sebelumnya, menunjukkan peningkatan kualitas hidup pengungsi

dan perbaikan atas kondisi-kondisi buruk yang terjadi akibat perasaan tertekan yang dirasakan para pengungsi selama berada di kamp, yang berujung pada kasus-kasus kekerasan seksual terhadap wanita.

Terlepas dari perubahan-perubahan positif yang dihasilkan oleh aktifitas-aktifitas UNHCR di Nepal, tidak dapat dipungkiri bahwa dependensi masyarakat pengungsi terhadap bantuan persediaan kehidupan meskipun tidak bertambah, namun tidak pula berkurang. Dependensi tinggi para pengungsi terhadap berbagai bentuk bantuan UNHCR kemudian akan menjadi masalah baru ketika bantuan UNHCR yang bersifat temporer di masa mendatang ditarik mundur dari Nepal dengan berbagai pertimbangan organisasional yang ada dalam tubuh UNHCR sendiri. Keterlibatan Bhutan dan Nepal sebagai dua negara yang terlibat langsung dalam isu pengungsi kaum *Lhotshampa* juga menjadi penting sebagai pihak-pihak yang paling berwenang untuk menentukan eksekusi penyelesaian krisis pengungsi terbaik. Oleh karena itu peran-peran yang dijalankan oleh UNHCR turut mempengaruhi cepat maupun lambatnya penyelesaian krisis pengungsi Bhutan di Nepal.

Satu peran UNHCR yang tidak maksimal sehingga tidak menghasilkan hasil yang diharapkan pula ialah keterlibatannya dalam forum pembicaraan bilateral level menteri antara pemerintah Bhutan dan Nepal, yaitu *Joint Ministerial Committee* (JMC) untuk proses penentuan dan verifikasi status pengungsi *Joint Verification Team* (JVT). Pada putaran-putaran pembicaraan tersebut, UNHCR hanya dilibatkan oleh pemerintah kedua negara untuk menyediakan sumber-sumber data kondisi dan komposisi populasi pengungsi di

tiap kamp yang ada sebagai bahan pertimbangan kedua negara untuk menentukan status kepengungsian para pengungsi dan untuk menemukan solusi terbaik.

Profesionalisme UNHCR dalam menyelenggarakan sensus dan pemberian bantuan-bantuan berupa data sumber bagi pembicaraan permasalahan pengungsi antara Bhutan dan Nepal sayangnya tetap tidak membantu terjadinya percepatan yang dicita-citakan. Para pengungsi tetap menghuni kamp-kamp yang tersedia mengingat hasil verifikasi penduduk pengungsi hanya meliputi segelintir populasi dari satu kamp, yaitu kamp Khudunabari. Kedua pemerintah bersikap sangat tertutup dalam setiap proses pembicaraan, sehingga tidak memungkinkan bagi UNHCR maupun rekan-rekan operasional seperti NGO dan badan-badan PBB lainnya untuk campur tangan dalam kebijakan-kebijakan yang dihasilkan kedua belah pihak pemerintah. Selain itu, melihat kenyataan bahwa hingga kini permasalahan pengungsi Bhutan di Nepal masih juga belum ditemukan solusi terbaiknya, maka dapat disimpulkan bahwa UNHCR belum dapat mengaktualisasikan solusi utama yang dikehendaki bagi tiap-tiap kasus pengungsi dunia, yaitu *repatriation*, *resettlement*, atau *integration*.

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan mengenai isu-isu pengungsi dan juga pengetahuan mengenai negara-negara di kawasan Asia Selatan, dengan dibantu kerangka teori mengenai peran IGO dalam penanganan permasalahan pengungsi yang ada di kawasan tersebut. Mekanisme-mekanisme yang dilalui oleh UNHCR dalam memberikan bantuan di Nepal tentunya dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi kemungkinan terjadinya permasalahan di kawasan lain, termasuk Indonesia. Indonesia yang juga dewasa ini sering

mengalami berbagai ketidakstabilan dalam ranah politik, ditambah maraknya bencana alam dalam skala besar, tentu bukan tidak mungkin bila di Indonesia muncul kasus *displaced persons* (mungkin saja *IDPs*, pengungsi, maupun pencari suaka politik). Indonesia kemudian bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Nepal maupun Bhutan sebagai dua negara yang terlibat langsung.

